

BAB III

OBJEK DAN METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Taman Sari Dua, Jakarta Barat.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Taman Sari Dua adalah unit dibawah Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat. Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat membawahi sebelas Kantor Pelayanan Pajak, antara lain KPP Madya Jakarta Barat, KPP Pratama Jakarta Palmerah, KPP Pratama Jakarta Tambora, KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu, KPP Prtama Jakarta Taman Sari Dua, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk dan KPP Pratama Jakarta Cengkareng, KPP Pratama Jakarta Kalideres, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua, KPP Pratama Jakarta Kembangan.

Visi KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua yang merupakan pula misi DJP secara keseluruhan adalah menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan menejemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

Misi KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua merupakan pula misi DJP secara keseluruhan adalah menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

KPP Pratama Taman Sari Dua mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam daerah kewenangannya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jendral Pajak.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pembinaan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Penatausahaan dan pengecekan SPT tahunan, SPT Masa serta berkas Wajib Pajak.
3. Pengawasan pembayaran masa pajak penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya.
4. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, pelaksanaan urusan distribusi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya.
5. Penelitian, pemeriksaan dan penerapan sanksi perpajakan.
6. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.

7. Pelaksanaan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
8. Pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga, kepegawaian dan keuangan.

Tugas dan fungsi yang diperankan KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua pada hakekatnya merupakan amanat Direktur Jendrel Pajak, oleh karena itu KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua berusaha menjadi aparat yang accountable, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan visi dan misi yang dibebankan secara transparan.

Struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Taman Sari berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI No. 06/KM.1/2004 tanggal 07 Januari 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum, tugasnya antara lain:
 - a. Urusan Kepegawaian seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pendidikan, dan laporan ketertiban.
 - b. Urusan keuangan seperti pengurusan gaji, tunjangan, rapel, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban ke KPN.
 - c. Urusan rumah tangga seperti menyediakan segala sarana dan prasarana untuk menunjang operasional sehari-hari.
2. Seksi Pelayanan, tugasnya antara lain:
 - a. Menerima SPT Masa atau Tahunan dari Wajib Pajak.

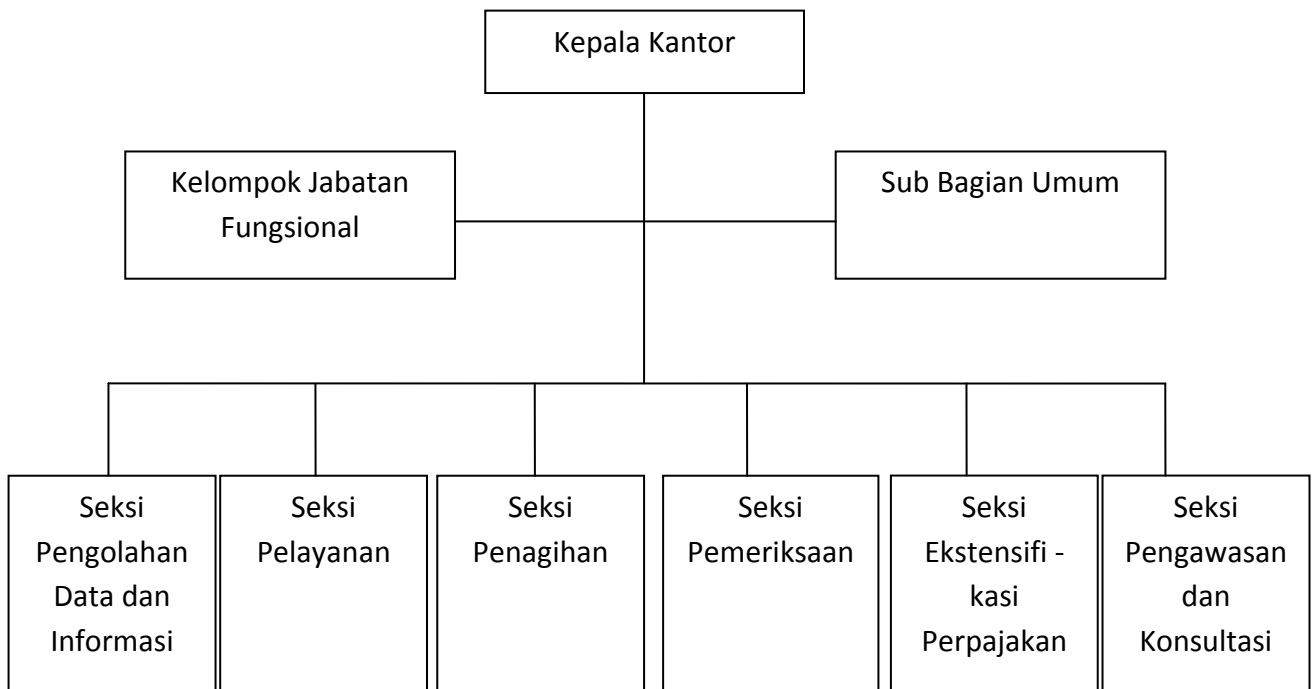
- b. Melayani pendaftaran Wajib Pajak
- c. Melayani permohonan penghapusan NPWP.
- d. Melayani perubahan nama dan alamat Wajib Pajak.
- e. Melayani permohonan pindah Wajib Pajak dari dan ke Kantor Pelayanan Pajak lain.
- f. Melayani/mengirimkan blanko SPT tahunan ke alamat Wajib Pajak melalui pos bagi Wajib Pajak yang tidak mengambil sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak.
- g. Melakukan penatausahaan SPT tahunan yang telah direkam.
- h. Melayani pengiriman blanko-blanko Laporan Pajak Pribadi (LP2) ke instansi pemerintah yang karyawannya wajib LP2.
- i. Menjelaskan pekerjaan yang berkaitan dengan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan.
- j. Melakukan tugas lain, yaitu:
 - 1) Membuat laporan bulanan perubahan *masterfile* lokal.
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak Non-Efektif dan mengefektifkan kembali apabila diminta.
- k. Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dengan dasar lembar-lembar penghitungan dan nota penghitungan dari seksi pemeriksaan dan seksi pengawasan dan konsultasi.
- l. Mengelola berkas Wajib Pajak yaitu menyimpan berkas Wajib Pajak, mengelola berkas Wajib Pajak apabila diperlukan oleh seksi

lain, melakukan administrasi penyimpangan dan keluar masuknya berkas Wajib Pajak.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, tugasnya antara lain:
 - a. Menerima surat-surat dan dokumen atau data dari kepala KPP.
 - b. Melakukan verifikasi lapangan untuk pengukuhan NPPKP.
 - c. Melakukan perekaman SPT yang diterima dari Seksi Pelayanan.
 - d. Melayani peminjaman atau pemanfaatan data dari seksi lain.
 - e. Mencari data ke kartu pengawasan data dan menggabungkan data ke dalam berkas data.
 - f. Melakukan pencarian data ke instansi pemerintah atau swasta dengan menerbitkan surat tugas.
 - g. Menyusun Laporan Penerimaan Pajak (LPP).
 - h. Membuat monografi fiskal yang nantinya dipergunakan sebagai bahan penggalan potensi pajak dan pengawasan Wajib Pajak.
 - i. Menyajikan informasi ke seluruh seksi di KPP Jakarta Taman Sari Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, dan Kantor Pusat DJP.
4. Seksi Ekstensifikasi, tugasnya antara lain yaitu melakukan ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak berdasarkan informasi pihak III seperti laporan bulanan PPAT, data Dispenda dan sebagainya. Data-data tersebut diolah dan diklarifikasi kepada calon Wajib Pajak dengan surat himbauan untuk memiliki NPWP bila ternyata telah memiliki NPWP maka akan dihentikan dan bila tidak maka akan ditindaklanjuti dengan NPWP secara jabatan.

5. Seksi Penagihan, tugasnya antara lain:
 - a. Menerima dan mengarsipkan SPP lembar 3 atas STP, SKPKB, atau SKPKBT.
 - b. Membuat kartu pengawasan tunggakan pajak.
 - c. Membuat surat pengawasan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
 - d. Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak sampai dengan penerbitan surat keputusannya.
 - e. Melaksanakan pekerjaan penghapusan piutang pajak.
 - f. Melaksanakan tindakan penagihan seperti surat tegoran, paksa, dan sebagainya.
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV
7. Seksi Pemeriksaan

Seksi ini terdiri dari satu orang Kepala Seksi, dua orang Supervisor, tiga orang ketua tim, tiga orang anggota tim dan empat orang pelaksana. Jabatan supervisor dan kepala seksi adalah sama atau setara, yang berbeda adalah bidang kerjanya. Kepala seksi pemeriksaan berhak menentukan Wajib Pajak mana saja yang akan diperiksa oleh tim yang dikepalai oleh seorang supervisor dan membaginya secara rata kepada tim yang ada.

Gambar 3.1**Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Taman sari Dua**

Saat ini wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Taman Sari Dua meliputi kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat yang membawahi empat Kelurahan, yaitu Kelurahan Glodok, Kelurahan Pinang Sia, Kelurahan Keagungan, dan Kelurahan Krukut. Sampai bulan November 2012 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Taman Sari berjumlah 22.826, dimana jumlah tersebut merupakan 17.173 Wajib Pajak Pribadi dan 5.653 Wajib Pajak Badan.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Natsir (1988) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran dan suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diteliti.

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi berkaitan dengan hal tersebut dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang telah disiapkan. Pernyataan-pernyataan yang akan dicantumkan dalam kuesioner akan dikembangkan sesuai dengan indikator yang digunakan dalam pengukuran konsep. Variabel-variabel tersebut yaitu:

3.3.1 Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono, variabel independen adalah variabel yang tidak terikat oleh faktor-faktor lain, tetapi mempunyai pengaruh terhadap variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

1. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X1)

Variabel independen atau variabel bebas (X) dari penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga pada tahun 2009 adalah sistem administrasi perpajakan modern dengan indikator pengukuran yang meliputi:

1. Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP.

Perubahan struktur peran dan modernisasi sistem kerja KPP, misalnya mengalokasikan kegiatan ke sub unit-sub unit yang berbeda, agar petugas pajak mengerti secara keseluruhan peran-peran bidang pekerjaannya. Petugas yang mengerti peran-peran tersebut akan sangat membantu dalam memberikan informasi untuk wajib pajak.

2. Perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak.

Usaha untuk meningkat penerimaan pajak tergantung dari penilaian wajib pajak terhadap kegunaan pajak tersebut dan petugas yang melayani mereka. Pelayanan yang baik bisa mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya.

3. Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Tidak semua wajib pajak bisa menyetorkan pajaknya secara langsung datang ke kantor pajak. Dalam modernisasi sistem administrasi disediakan fasilitas teknologi informasi melalui internet misalnya.

4. Kode etik.

Petugas dan wajib pajak harus memiliki kode etik atau peraturan yang membuat mereka tidak melanggar peraturan pajak dan mematuhi kewajibannya. Petugas yang mematuhi kode etik akan memberikan rasa nyaman dan kepercayaan untuk wajib pajak. Dan wajib pajak yang membayarkan pajaknya sesuai kode etik akan menambah penerimaan yang seharusnya didapat negara.

2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan (X2)

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Pengukuran variabel pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan menurut Widayati dan Nurlis (2010), yaitu:

a. Kepemilikan NPWP.

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana pengadministrasian pajak.

b. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan.

Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya secara benar, salah satunya adalah membayar pajak.

- c. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.

Semakin tahu wajib pajak tentang peraturan pajak dan sanksinya jika melakukan pelanggaran, maka akan mendorong wajib pajak taat melakukan kewajibannya.

- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.

Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak, akan mendorong wajib pajak menghitung kewajibannya secara benar.

- e. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.

Semakin sering sosialisasi yang dilakukan petugas membuat pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak menjadi lebih puas, maka akan mendorong wajib pajak membayar pajak.

- f. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.

Semakin sering training yang dilakukan wajib pajak membuat pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak menjadi lebih puas, maka akan mendorong wajib pajak membayar pajak.

3. Tingkat Pendidikan Wajib Pajak (X3)

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu hasil peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu sendiri (nilai dan norma masyarakat) yang berfungsi sebagai filsafat

pendidikannya atau sebagai cita-cita dan pernyataan tujuan pendidikannya. Pengukuran variabel tingkat pendidikan wajib pajak berdasarkan ciri atau unsur umum dalam pendidikan menurut Fuad Ihsan, yaitu:

- a. Pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai.

Pendidikan yang dimiliki wajib pajak memiliki tujuan yang bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai individu, masyarakat, atau warga negara. Apakah pendidikan tersebut memiliki tujuan yang untuk melanggar peraturan perpajakan atau tidak.

- b. Pendidikan perlu melakukan usaha-usaha yang disengaja dan berencana.

Untuk mencapai tujuan untuk kesejahteraan hidup wajib pajak perlu memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai terhadap yang akan dia lakukan. Jika dia melakukan hal-hal tersebut akan membuat wajib pajak memikirkan kembali untuk melakukan pelanggaran pajak.

- c. Kegiatan pendidikan diberikan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Lingkungan menentukan sikap wajib pajak dalam mengambil keputusan, baik dalam mengambil keputusan untuk menaati maupun untuk melanggar peraturan perpajakan.

3.3.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan identifikasi Chaizi Nasuch, pengukuran variabel kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tabel 3.1
Kisi-Kisi Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Pernyataan	Skala	Sumber
1	Sistem Administrasi Perpajakan Modern	1. Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP. 2. Perubahan implementasi pelayanan kepada WP. 3. Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi. 4. Kode etik	1-3 4-6 7-9 10-12	Likerts	Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009)
2	Pengertian dan Pemahaman tentang Perpajakan	1. Kepemilikan NPWP 2. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan. 3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi.	13-14 15-16 17-19	Likerts	Widayati dan Nurlis (2010)

		4. Pengetahuan dan pemahaman tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak.	20-22		
		5. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan melalui sosialisasi.	23-24		
		6. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan melalui training.	25-26		
3	Tingkat Pendidikan Wajib Pajak	1. Pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai.	27-29	Likerts	Fuad Ihsan (2003)
		2. Pendidikan perlu melakukan usaha-usaha yang disengaja dan berencana.	30-31		
		3. Usaha memilih materi, strategi kegiatan, dan teknik penilaian sesuai dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat	32-33		
4	Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri.	34-36	Likerts	Siti Kurnia Rahayu (2010)
		2. Kepatuhan WP untuk menyetorkan kembali SPT.	37-39		
		3. Kepatuhan WP dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.	40-42		
		4. Kepatuhan WP dalam pembayaran tunggakan pajak	43-45		

Sumber: penulis (2012)

3.4 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diteliti, penelitian ini tergolong dalam penelitian data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Dalam penelitian ini, teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner. Instrumen ini dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang bersifat tertutup kepada responden. Daftar pertanyaan berkaitan dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat pendidikan wajib pajak yang dikaitkan dengan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

3.5 Metode Penentuan Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2003) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pribadi pada ruang lingkup KPP Pratama Taman Sari Dua, Jakarta Barat.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian. Metode penentuan sampel penelitian yang dipakai yaitu *Convenience Sampling*. Sampel diambil berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristiknya, maka orang tersebut dapat dijadikan sampel.

3.6 Metode Analisis

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini perlu diuji kesahihannya dan keandalannya, karena data tersebut berasal dari jawaban responden yang mungkin dapat menimbulkan bias. Hal ini dirasa penting untuk dilakukan sebab kualitas data yang diolah akan mempengaruhi kualitas hasil penelitian.

3.6.1 Uji Validitas dan Reabilitas

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana ketepatan alat ukur penelitian tentang isu atau arti sebenarnya yang diukur (Ghozali, 2011). Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel.

Menurut Cooper (2006), untuk menguji validitas konstruk suatu alat test bisa menggunakan metode korelasi, yaitu korelasi alat test yang diajukan dengan yang membangunnya. Pada penerapannya uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS dengan menggunakan korelasi pearson antara tiap variabel pertanyaan terhadap rata-rata dari tiap konstruk pertanyaan tersebut.

Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka dilakukan perbandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r

tabel. Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ berarti item valid. Sebaliknya jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ berarti item tidak valid (gugur).

3.6.1.2 Uji Reabilitas

Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Sekaran (2003) mengemukakan bahwa uji reliabilitas ditujukan untuk mengetahui stabilitas dan konsistensi di dalam pengukuran.

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan untuk lebih dari satu variabel, namun sebaiknya uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel pada lembar kerja yang berbeda sehingga dapat diketahui konstruk variabel mana yang tidak reliabel. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan *Cronbach Alpha*. Menurut Nunnally (1969) dalam Imam Ghazali (2004) suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6.

3.6.2 Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2011: 19) Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengukur nilai maksimum dan nilai minimum dari pernyataan tiap variabel. Peneliti ingin mengetahui pernyataan mana yang sudah tercapai dan belum maksimal dari pengukuran yang diambil dari tiap variabel.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011 : 160), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali, (2011 : 105), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Tolerance mengukur variabilitas bebas yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Model regresi yang bebas multikolinearitas adalah yang mempunyai VIF (*Variance Inflasing Factor*) = 10 dan nilai tolerance = 0,1. untuk melihat variabel bebas dimana saja saling

berkorelasi adalah dengan metode menganalisis matriks korelasi antar variabel bebas. Korelasi yang kurang dari 0,05 menandakan bahwa variabel bebas tidak terdapat multilinearitas yang serius (Ghozali,2011).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali, (2011: 139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambar dalam model regresi secara spesifik atau dengan kata lain jika residual tidak memiliki varians yang konstan. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b₁ : Koefisien regresi untuk variabel X₁

X₁ : Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

b₂ : Koefisien regresi untuk variabel X₂

- X_2 : Pengetahuan dan Pemahaman tentang Perpajakan
- b_3 : Koefisien regresi untuk variabel X_3
- X_3 : Tingkat Pendidikan Wajib Pajak
- e : error

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji t

Yaitu suatu uji yang digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Untuk menguji hipotesis menggunakan uji-t dengan tingkat signifikansi (α) 5% dengan sampel (n).

1. Kriteria hipotesis

H_0 ; $\beta < 0$; tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a ; $\beta > 0$; ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Kriteria pengujian:

Jika nilai t hitung $< t$ tabel, H_0 diterima dan H_a ditolak hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Jika nilai t hitung $> t$ tabel, H_0 ditolak dan H_a diterima hal ini berarti bahwa ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.6.5.2 Uji F

Untuk menguji secara simultan semua variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis menggunakan uji-F dengan tingkat signifikan (α) 5%, dengan sampel (n) dan jumlah variabel (k) = 2.

1. Pengujian Hipotesis

H_0 ; $\beta < 0$; tidak ada pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

H_a ; $\beta > 0$; ada pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

2. Kriteria Pengujian:

Jika nilai F hitung $< F$ tabel, H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Jika nilai F hitung $> F$ tabel, H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan variabel-variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.